



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**LKjIP**



*Tahun 2019*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nyalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai tahun 2019 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Serta Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Banggai Nomor : 061/0094/Bag.Org tanggal 17 Januari 2020 tentang Permintaan LKjIP Tahun 2019, dimana setiap satuan kerja/ instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah di program selama satu tahun dalam bentuk laporan Kinerja.

LKjIP ini disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas segala keberhasilan dan kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Banggai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pencapaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai tahun 2019 beserta realisasinya, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai tahun 2019 ini dalam garis besarnya memuat informasi tentang perencanaan dan perjanjian kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Banggai 2016 - 2021, sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2019, dengan demikian seluruh pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat dievaluasi untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Harapan kami, kiranya LKjIP ini dapat memberikan manfaat konstruksif bagi Instansi Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak utamanya para pejabat Struktural maupun Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai yang turut terlibat dalam penyusunan LKjIP tahun 2019 kami ucapkan terima kasih.

Luwuk, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik  
Kabupaten Banggai,



**Drs. IRPAN POMA, ME**  
NIP. 19670615 198811 1 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2019 adalah Laporan tahunan yang merupakan realisasi Rencana Strategik ( RENSTRA ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai 2016 - 2021. Penyusunan LKjIP tahun 2019 ini sepenuhnya mengacuh pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai yang merupakan bagian Integral dari Rencana Strategik Kabupaten Banggai tahun 2016 – 2021, sehingga kegiatan – kegiatan yang memuat dalam LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai tahun 2019 ini pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Banggai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sebagai salah satu Lembaga teknis yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, oleh karena itu semua instansi dan substansi dalam LKjIP tahun 2019 yang memuat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

Penyusunan LKjIP tahun 2019 ini menyajikan penjelasan seluruh capaian kinerja dengan membandingkan antara rencana / target dengan realisasi baik sasaran maupun kegiatan tahun 2019, memuat keberhasilan dalam pencapaian semua sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk penilaian capaian kinerja dilakukan perbandingan antara target dan realisasi dari indikator kinerja dari input, output dan outcome yang diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran. Dengan kinerja tahun 2019 untuk periode tahun 2019 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai melaksanakan 42 kegiatan dalam 10 program yang dimuat dalam RKA, DPA dan DPPA untuk memenuhi 2 Sasaran Strategik. Untuk melaksanakan semua aktifitas disediakan anggaran sebesar Rp. 6.494.157.966,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Capaian kinerja selama tahun 2019 menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai telah berhasil memenuhi 2 Sasaran Strategik dari 2 Sasaran Strategik yang ditargetkan dengan rata – rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%.


Sasaran stratejik yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya.
2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya.

Luwuk, 12 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banggai,



  
**Drs. IRPAN POMA, ME**  
NIP. 19670615 198811 1 002

## DAFTAR ISI

|                                     | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar .....                | ii      |
| Ikhtisar Eksekutif.....             | iii     |
| Daftar Isi .....                    | v       |
| Daftar Tabel.....                   | vi      |
| <br>                                |         |
| Bab I PENDAHULUAN .....             | 1       |
| A. Latar Belakang .....             | 1       |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi .....     | 2       |
| C. Isu Strategis.....               | 6       |
| <br>                                |         |
| Bab II RENCANA KINERJA.....         | 7       |
| A. Rencana Strategis.....           | 7       |
| 1. Visi.....                        | 8       |
| 2. Misi .....                       | 8       |
| 3. Tujuan dan Sasaran.....          | 9       |
| 4. Indikator Kinerja Utama .....    | 10      |
| 5. Rencana Kinerja Tahunan .....    | 10      |
| 6. Perjanjian Kinerja .....         | 11      |
| <br>                                |         |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... | 12      |
| A. Capaian Kinerja Organisasi ..... | 12      |
| B. Realisasi Anggaran .....         | 15      |
| <br>                                |         |
| BAB IV PENUTUP.....                 | 20      |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN                 |         |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kab. Banggai .....  | 8       |
| Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol.....   | 9       |
| Tabel. 2.3. Rencana Kerja Tahunan Badan Kesbangpol.....   | 9       |
| Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja .....  | 10      |
| Tabel. 3.1. Skala Pengukuran Kinerja LKjIP.....   | 11      |
| Tabel. 3.2. Analisis capaian kinerja sasaran strategis .....  | 12      |
| Tabel. 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama .....   | 12      |
| Tabel. 3.5. Rincian Dana Target dan Realisasi Program/Kegiatan T.A 2019.....  | 13      |
| Tabel. 3.6. Rincian Dana yang di Anggarkan/Targetkan dan di Realisasikan untuk<br>Mewujudkan Pencapaian Sasaran ..... | 15      |
| Tabel.3.7. Realisasi Belanja Tidak Langsung .....   | 16      |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LKjIP tahun 2019.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah (Badan Kesbangpol Kab. Banggai) dalam mencapai Sasaran Strategis Instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran 2019. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Kab. Banggai;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol Kab. Banggai pada tahun berikutnya.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kertja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah. yang mempunyai tugas :

### **Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan Tupoksi diatas, maka berdasarkan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang **Kepala Badan** yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang dan 8 (delapan) Kepala Sub. Bidang dan 3 (tiga) Kepala Sub. Bagian serta 13 (tiga belas) Jabatan Pelaksana, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
  1. Sub Bidang Ideologi; dan
  2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, meliputi:
  1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- e. Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama, meliputi:
  1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan budaya; dan
  2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Politik, meliputi:
  1. Sub Bidang Implementasi dan pendidikan politik; dan
  2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu;



- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan  
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.  
 ( Untuk lebih jelasnya pada struktur organisasi pada halaman ...4...)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Banggai No. 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai yang di dukung oleh berbagai sumber daya yang ada diantaranya sumber daya manusia/personil **sebanyak 30 (Tiga Puluh ) orang**. Dan di tambah tenaga honorer yang masuk data base. Dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Berdasarkan Jabatan Sruktural**

Jumlah pegawai Negeri sipil yang memangku Jabatan struktural sebanyak 30 (Tiga puluh orang) orang. Sebagaimana tabel di bawah ini :

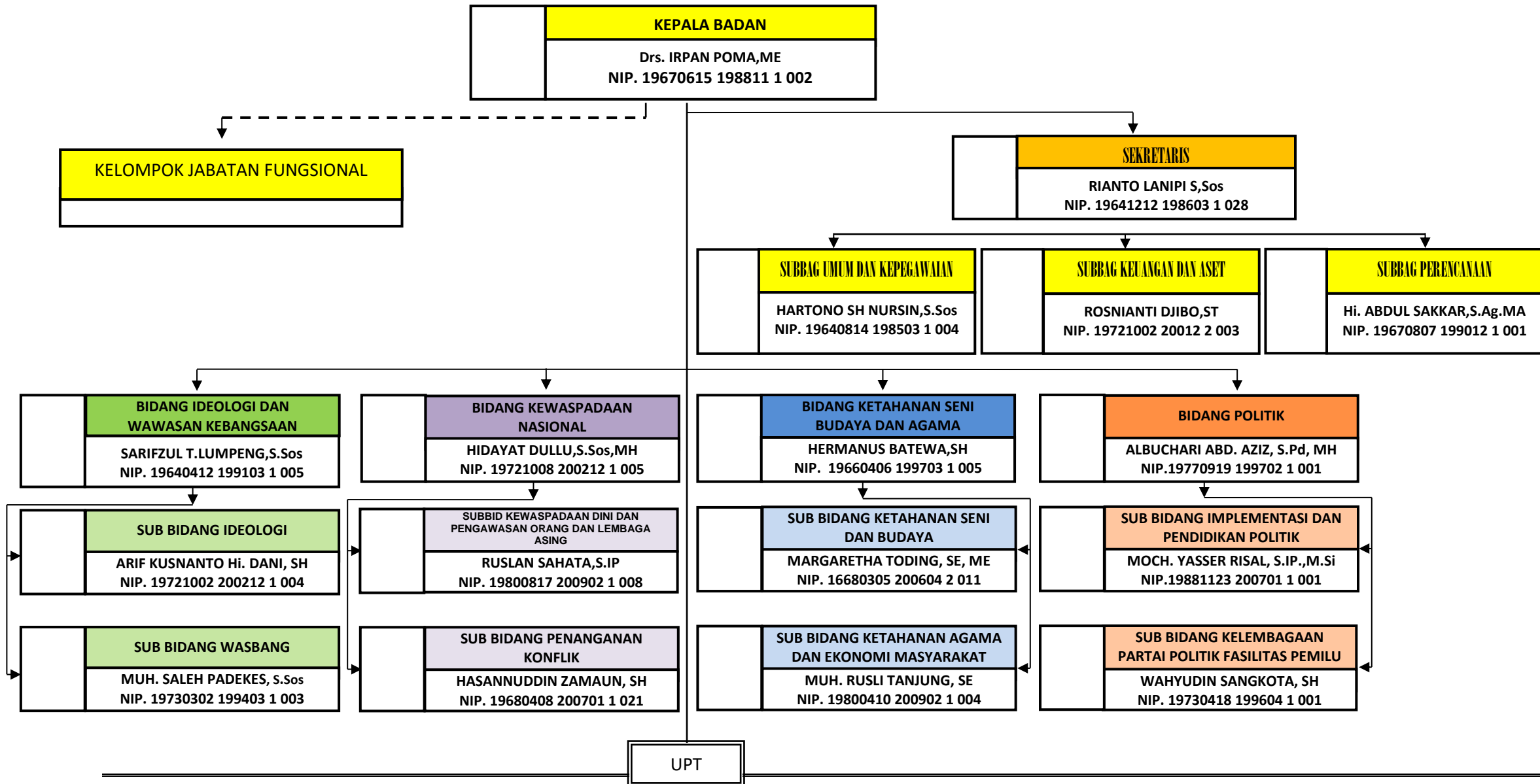
| NO            | JABATAN       | ESELON | JUMLAH | KET. |
|---------------|---------------|--------|--------|------|
| 1             | 2             | 3      | 4      | 5    |
| 1.            | Kepala Badan  | II/b   | 1      |      |
| 2.            | Sekretaris    | III/a  | 1      |      |
| 3.            | Kepala Bidang | III/b  | 4      |      |
| 4.            | Kepala Seksi  | IV/a   | 11     |      |
| 5.            | Staf          | -      | 13     |      |
| <b>Jumlah</b> |               |        | 30     |      |

➤ **Jumlah Pegawai menurut Pangkat / Golongan**

| NO            | PANGKAT / GOLONGAN RUANG      | JUMLAH | KET |
|---------------|-------------------------------|--------|-----|
| 1             | 2                             | 3      | 4   |
| 1.            | Pembina Utama Muda. IV/c      | 1      |     |
| 2.            | Pembina Tingkat I. IV/b       | 1      |     |
| 3.            | Pembina. IV/a                 | 4      |     |
| 4.            | Penata Tingkat I. III/d       | 10     |     |
| 5.            | Penata. III/c                 | 3      |     |
| 6.            | Penata Muda Tingkat I. III/b  | 3      |     |
| 7.            | Penata Muda. III/a            | 3      |     |
| 8.            | Pengatur Tkt I, II/d          | 2      |     |
| 9.            | Pengatur. II/c                | 1      |     |
| 10            | Pengatur Muda Tingkat I. II/b | 1      |     |
| 11            | Pengatur muda. II/a           | 1      |     |
| <b>Jumlah</b> |                               | 30     |     |

Apabila dilihat dari beban kerja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai belum signifikan, sehingga ditempuh kebijakan untuk menerima / mengangkat Tenaga Honorer (PHL) dalam rangka membantu kelancaran administrasi dan tugas – tugas lainnya.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN DAN POLITIK



### **C. Isu Strategis**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan suku, budaya, agama dan Stratifikasi Masyarakat sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Banggai, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari belum maksimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih adanya konflik-konflik dan demonstrasi yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi dan penutupan jalan.

3) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat  
Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese

negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintahan. Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab dan memenuhi keinginan tuntutan dinamika lingkungan strategis.

Dengan kata lain rencana strategis yang disusun suatu instansi Pemerintah setidaknya mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi serta mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan serta mencapai tujuan kedepan, dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan kondisi faktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam menyelenggarakan kegiatannya. dan juga sebagai alat manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai mengacu kepada visi misi Bupati Banggai sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

## 1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam

masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kab. Banggai Tahun 2016-2021 :

**"MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA "**

## 2. Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan sebagai tindak lanjut dari visi tersebut harus di jabarkan dalam bentuk misi yang akan dilaksanakan.

Untuk memenuhi terwujudnya visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Kabupaten Banggai 2016-2021, sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
- Misi 2 : Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi.
- Misi 3 : Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah.
- Misi 4 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
- Misi 5 : Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya.
- Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan misi kesatu Kabupaten Banggai yaitu : **"Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa"** dari misi kesatu tersebut sasaran yang di dukung yaitu "meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai" melalui strategi "Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik" untuk mencapai stategi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di dukung tiga program yaitu :

- Program Pengembangan wawasan kebangsaan
- Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat
- Program Pendidikan politik masyarakat

Selain misi kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki keterkaitan dengan misi kelima Kabupaten Banggai yaitu: "Mewujudkan Pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya" Dari misi kelima tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai adalah "Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat" melalui strategi "Meningkatkan pengembangan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama" untuk mencapai strategi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banggai Menetapkan dua program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Banggai, yaitu :

- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
- Program pemberdayaan ketahanan seni budaya dan agama

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai yang ingin di capai sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran, sebagai Berikut:

**Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai**

| No | Tujuan                                      | Sasaran  |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatkan Kesatuan Bangsa                | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya |
| 2. | Meningkatkan partisipasi politik Masyarakat | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya                     |

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sebagai berikut:

**Tabel. 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                         | Formula  | Sumber Data   |
|----|--|---|--|---|
| 1  | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM          | Jumlah Angka Kejadian Konflik IPLESOSBUDHANKAM   | Laporan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)                            |
|    |  | Angka konflik SARA di masyarakat          | Jumlah Angka Kejadian Konflik SARA   | Laporan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), Forum Pembauran Kehansaan (FPK) |
| 2  | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya                     | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | $\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap (DPT)}} \times 100 \%$ | Data Pilkada, Pileg, dan Pilpres Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai   |

#### 5. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian yang diharapkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai pada tahun 2019 dapat dilihat dari penetapan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan dan target keluarannya pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                         | TARGET | Program   |
|----|--|---|--------|---|
| 1  | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM          | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</li> </ul>                  |
|    |  | Angka konflik SARA di masyarakat          | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</li> <li>- Program Peningkatan Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya dan Agama</li> </ul> |
| 4  | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya                     | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | 85%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ul>   |

## 6. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berikut merupakan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akintabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019. Selain itu Perjanjian Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen yang terdokumentasi antara Kepala OPD dengan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah. Untuk lebih lengkapnya rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                  | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM          | 0             |
|           |  | angka konflik SARA di masyarakat          | 0             |
| 2         | Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya                                  | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | 73%           |

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

|     |   |    |               |
|-----|---|----|---------------|
| 1.  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Rp | 739.826.355   |
| 2.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Rp | 172.046.000   |
| 3.  | Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNSProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Rp | 10.000.000    |
| 4.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur   | Rp | 51.096.645    |
| 5.  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan              | Rp | 95.929.500    |
| 6.  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan   | Rp | 337.116.000   |
| 7.  | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan                       | Rp | 1.109.644.000 |
| 8.  | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)                               | Rp | 51.208.000    |
| 9.  | Program Peningkatan Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya dan Agama                            | Rp | 253.698.000   |
| 10. | Program Pendidikan Politik Masyarakat   | Rp | 277.435.500   |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Realisasi} \quad \text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi  
Pemerinta Peringkat Kinerja**

| No. | Skala Capaian Kinerja | Kategori    |
|-----|-----------------------|-------------|
| 1.  | ≥ 100 %               | Sangat baik |
| 2.  | 75 – 100 %            | Baik        |
| 3.  | 55 – 74 %             | Cukup       |
| 4.  | < 55 %                | Kurang      |

Capaian Indikator kinerja adalah suatu pengukuran kinerja sesuai dengan indicator-indikator sasaran yang tertuang dalam Sasaran-Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021 khususnya pada realisasi sesuai perencanaan di tahun 2019.

Adapun evaluasi per indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Analisis capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya"**

| NO | INDIKATOR SASARAN                            | SATUAN | TAHUN 2018 |           | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) |
|----|--|--------|------------|-----------|--------------------------------|
|    |  |        | TARGET     | REALISASI |                                |
| 1  | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM (nol = 100) | angka  | 0          | 0         | 100%                           |
| 2  | Angka konflik SARA di masyarakat (nol=100)   | angka  | 0          | 0         | 100%                           |

Adapun capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3. Analisis capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya"**

| NO | INDIKATOR SASARAN                         | SATUAN | TAHUN 2018 |           | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%) |
|----|---|--------|------------|-----------|--------------------------------|
|    |   |        | TARGET     | REALISASI |                                |
| 1  | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | Persen | 73         | 73        | 100%                           |

**Tabel. 3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

| NO | INDIKATOR KINERJA                            | REALISASI | REALISASI | NILAI CAPAIAN | KATEGORI    |
|----|--|-----------|-----------|---------------|-------------|
|    |  | 2017      | 2018      |               |             |
| 1  | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM (nol = 100) | 0         | 0         | 100%          | sangat baik |
| 2  | Angka konflik SARA di masyarakat (nol=100)   | 0         | 0         | 100%          | sangat baik |
| 3  | persentase DPT yang menggunakan hak pilih    | 73        | 73        | 100%          | sangat baik |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dari 3 (Tiga) indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai masuk dalam kategori sangat baik.

## B. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam tahun anggaran 2019 sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPPA ) memperoleh dana sebesar Rp. 6.494.157.966,- Dana tersebut terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.396.157.966,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 3.098.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan LKjIP 2019 yang paling dominan melaporkan berkisar pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang termuat dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam tahun 2019 melaksanakan 12 program dan 43 kegiatan dengan memperoleh dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ( DBH).

Berikut ini rincian dana yang dianggarkan / ditargetkan dan realisasinya berdasarkan program / kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 3.5. RINCIAN DANA TARGET DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM / KEGIATAN T.A 2019**

| No       | Program/Kegiatan   | Target (Rp)          | Realisasi (RP)       | Capaian       |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | <b>739.826.355,-</b> | <b>720.085.143,-</b> | <b>97,33%</b> |
| 1        | Penyediaan jasa surat menyurat   | 6.900.000,-          | 6.900.000,-          | 100%          |
| 2        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 34.300.000,-         | 27.918.116,-         | 100%          |
| 3        | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 14.000.000,-         | 13.904.500,-         | 99,32%        |
| 4        | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 16.070.100,-         | 15.867.300,-         | 98,74%        |
| 5        | Penyediaan alat tulis kantor   | 30.000.000,-         | 29.981.900,-         | 99,94%        |
| 6        | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 11.200.000,-         | 11.200.000,-         | 100%          |
| 7        | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | 5.201.400,-          | 5.155.000,-          | 99,12%        |
| 8        | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan             | 5.927.500,-          | 5.910.000,-          | 99,70%        |
| 9        | Penyediaan makanan dan minuman   | 23.600.000,-         | 23.570.000,-         | 99,87%        |
| 10       | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                    | 161.727.355,-        | 161.727.355,-        | 100%          |
| 11       | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                     | 130.000.000,-        | 128.939.092,-        | 99,18%        |

|           |   |                        |                        |               |
|-----------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 12        | penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran  | 300.900.000,-          | 289.011.380,-          | 96,05%        |
| <b>13</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>172.046.000,-</b>   | <b>159.390.150,-</b>   | <b>92,64%</b> |
| 14        | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | 10.456.000,-           | 7.956.000,-            | 76,09%        |
| 15        | Pengadaan peralatan gedung kantor   | 55.405.000,-           | 55.404.900,-           | 100%          |
| 16        | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 60.000.000,-           | 59.680.000,-           | 99,47%        |
| 17        | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional                               | 36.000.000,-           | 32.994.250,-           | 91,65%        |
| 18        | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | 3.360.000,-            | 3.355.000,-            | 99,85%        |
| 19        | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                    | 6.825.000,-            | -                      | -             |
| <b>20</b> | <b>Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>                                       | <b>10.000.000,-</b>    | <b>6.701.400,-</b>     | <b>67,01%</b> |
| 21        | Pemulangan pegawai yang pensiun   | 10.000.000,-           | 10.000.000,-           | 67,01%        |
| <b>22</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>51.096.645,-</b>    | <b>23.197.000,-</b>    | <b>45,31%</b> |
| 23        | Pendidikan dan pelatihan formal   | 25.282.145,-           | -                      | -             |
| 24        | Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur   | 25.814.500,-           | 23.197.000,-           | 100%          |
| <b>25</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>95.929.500,-</b>    | <b>95.748.499,-</b>    | <b>99,81%</b> |
| 26        | Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                        | 15.362.000,-           | 15.362.000,-           | 100%          |
| 27        | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | 10.000.000,-           | 9.828.000,-            | 98,28%        |
| 28        | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | 7.500.000,-            | 7.491.200,-            | 99,98%        |
| 29        | Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD                                      | 63.067.500,-           | 63.067.299,-           | 100%          |
| <b>30</b> | <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>  | <b>337.116.000,-</b>   | <b>333.368.500,-</b>   | <b>98,88%</b> |
| 31        | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat                 | 76.685.000,-           | 76.685.000,-           | 100%          |
| 32        | Fasilitasi dan peningkatan pembauran kebangsaan di Kab.Banggai                        | 144.365.000,-          | 141.603.500,-          | 98,09%        |
| 33        | Dialoga kebangsaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda        | 67.598.000,-           | 66.716.000,-           | 98,70%        |
| 34        | Pelatihan peningkatan wawasan kebangsaan  | 48.468.000,-           | 48.364.000,-           | 99,79%        |
| <b>35</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>          | <b>1.109.644.000,-</b> | <b>1.106.479.341,-</b> | <b>99,71%</b> |
| 36        | Penyuluhan Aparat Desa/Kelurahan dan anggota BPD                                      | 77.012.000,-           | 76.995.000,-           | 99,98%        |

|    |  |                      |                      |               |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 37 | Fasilitasi dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)             | 119.159.000,-        | 117.701.214,-        | 98,78%        |
| 38 | Koordinasi penanganan konflik di daerah  | 885.930.000,-        | 885.312.100,-        | 99,93%        |
| 39 | Pemantauan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing di daerah     | 27.543.000,-         | 26.471.027,-         | 96,11%        |
| 40 | <b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>             | <b>51.208.000,-</b>  | <b>49.409.000,-</b>  | <b>96,48%</b> |
| 41 | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba            | 51.208.000,-         | 49.409.000,-         | 96,48%        |
| 42 | <b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>                                     | <b>277.435.500,-</b> | <b>277.347.500,-</b> | <b>99,96%</b> |
| 43 | Penyuluhan kepada masyarakat   | 108.254.500,-        | 108.254.500,-        | 100%          |
| 44 | Operasional kelancaran tim pertimbangan kelayakan bantuan keuangan kepada parpol | 23.160.000,-         | 23.080.000,-         | 99,65%        |
| 45 | Pemantapan etika budaya politik  | 41.803.000,-         | 41.803.000,-         | 100%          |
| 46 | Monitoring evaluasi kondisi politiknya dan penetapan data base parpol di daerah  | 104.218.000,-        | 104.210.000,-        | 99,99%        |
| 47 | <b>Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya dan Agama</b>                      | <b>253.698.000,-</b> | <b>240.088.101,-</b> | <b>94,63%</b> |
| 48 | Operasional kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)            | 44.140.000,-         | 39.938.500,-         | 90,48%        |
| 49 | Fasilitasi dan peningkatan forum komunikasi umat beragama                        | 121.408.000,-        | 113.718.001,-        | 93,67%        |
| 50 | Monitoring evaluasi dan penyusunan data base ormas                               | 27.580.000,-         | 25.861.600,-         | 93,77%        |
| 51 | Pembinaan peningkatan peran serta LSM, Ormas dan OKP                             | 60.570.000,-         | 60.570.000,-         | 86,21%        |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>3.098.000.000</b> | <b>3.011.814.634</b> | <b>97,22%</b> |

Berdasarkan rincian dana yang dianggarkan / ditargetkan untuk direalisasikan dalam melaksanakan 12 program dan 43 kegiatan tersebut diatas, dengan merencanakan / target dana yang digunakan sebesar Rp. 3.098.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.011.814.634,- atau mencapai 97.22%%.

Selain akuntabilitas keuangan yang berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka berikut ini rincian dana yang dianggarkan/ditargetkan dan direalisasikan untuk mewujudkan pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel. 3.6. RINCIAN DANA YANG DIANGGARKAN/DITARGETKAN DAN DIREALISASIKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENCAPAIAN SASARAN**

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                         | Program   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen |
|----|---|---|---|---------------|----------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM          | - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                               | 455.552.100   | 428.874.500    | 94,14% |
|    |   |   | - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 1.168.036.600 | 1.121.029.000  | 95,98% |
|    |   | Angka konflik SARA di masyarakat          | - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Peklat)        | 39.113.000    | 33.061.500     | 84,53% |
|    |   |   | - Program Peningkatan Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya dan Agama      | 192.335.500   | 171.844.000    | 89,35% |
| 2  | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam   | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | - Program Pendidikan Politik Masyarakat                                 | 193.785.500   | 190.933.000    | 98,53% |

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai merencanakan 2 sasaran untuk diwujudkan tahun 2019, dan ke 2 sasaran tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan Capaian Kinerja Sasaran rata – rata sebesar 100%.

Realisasi belanja tidak langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 yang terdiri dari gaji dan tunjangan terealisasi sebesar 92,30% dengan rincian pada tabel berikut ini:

**Tabel. 3.7. REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019**

| No | Kegiatan                   | Target (Rp)   | Realisasi (Rp) | Capaian % |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 1  | 2                          | 4             | 5              | 6         |
| 1. | Gaji dan Tunjangan Pegawai | 3.396.157.966 | 3.128.676.815  | 92,12%    |
|    | Jumlah                     | 3.396.157.966 | 3.128.676.815  | 92,12%    |

Realisasi penggunaan anggaran sesuai pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung dengan target anggaran sebesar Rp. 3.396.157,- dengan realisasi Rp. 3.128.676.815,- atau 92.12%.
- Belanja Langsung dengan target anggaran Rp. 3.098.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.011.814.634,- atau 92.12%.

- Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung dengan target anggaran sebesar Rp. 6.494.157.966,- dengan realisasi Rp. 6.140.491.449,- atau 94.55%.

Pemanfaatan dana kurang dari target awal dengan realisasi 94.55% dan sisa dana tersebut telah di kembalikan pada **Kas Daerah** sedangkan sisa dana yang lainnya adalah tidak direalisasikan dengan kata lain dana tersebut tidak diajukan / tidak diminta karena penggunaan anggaran telah terpenuhi sesuai kebutuhan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Pada Pembahasan tinjauan secara umum pelaksanaan beberapa program dan kegiatan selama tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai telah memenuhi seluruh sasaran melalui pelaksanaan beberapa program / kegiatan, semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Dengan demikian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019, seluruhnya dapat dicapai dengan baik, dengan capaian kinerja sasaran rata – rata 100 %, kemudian dari rencana / target anggaran sebesar Rp. 6.494.157.966,- dengan realisasinya Rp. 6.140.491.449,- atau 94.55%.

Pencapaian realisasi anggaran di bawah 100 % namun rata-rata kegiatan dalam pencapaian volume terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100% namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai 100% sehingga pencapaian target keseluruhan di bawah 100 % dengan pemanfaatan dana yang kurang dari target awal (kurang dari 100 % ), hal ini disebabkan :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur pelaksana belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Belum Optimalnya pemanfaatan anggaran sesuai target kinerja yang di tetapkan.
3. Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi khususnya dalam penanganan masalah aktual di daerah.

### **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Pada penjelasan secara umum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Namun dengan demikian pada pelaksanaan beberapa program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan / masalah yang dijumpai, sebagaimana uraian pada pembahasan sebelumnya.

Untuk meminimalisir terhadap hambatan / permasalahan tersebut, maka alternatif pemecahan masalah atau strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki Kualitas SDM dan Kinerja Aparatur dalam institusi, khususnya untuk aparatur pengelola keuangan agar proses pencairan dana serta

administrasinya dapat berjalan lancar dan tidak menghambat program dan kegiatan yang telah direncanakan

2. Meningkatkan kemampuan / kualitas dibidang perencanaan / program Melalui Bintek dan Pelatihan Perencanaan sehingga penyusunan atau penetapan program dan kegiatan akan lebih terarah, guna terlaksana secara optimal, responsive dan akuntabel di tahun – tahun mendatang.
3. Meningkatkan Jumlah personil dan ikuti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia / aparatur, baik dari segi kualifikasi pendidikan, keterampilan dan keahlian dalam rangka peningkatan kinerja dalam pencapaian target / sasaran yang ditetapkan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan memberdayakan segenap komponen masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah aktual di daerah.
5. Perlu adanya penguatan data dan informasi yang diperlukan khususnya situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

**LAMPRAN**

**PERJANJIAN KINERJA 2019**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BANGGAI**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. IRPAN POMA,ME**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**  
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, 1 Oktober 2019

Pihak Kedua

**BUPATI BANGGAI**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BANGGAI**



**Drs. IRPAN POMA,ME**  
**Nip. 19670615 198811 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                         | TARGET     |
|----|--|---|------------|
| 1. | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM          | 0 Kejadian |
|    |  | angka konflik SARA di masyarakat          | 0 Kejadian |
| 2. | Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya                                  | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | 73%        |

| PROGRAM  | ANGGARAN                 |
|--|--------------------------|
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Rp 739.826.355           |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Rp 172.046.000           |
| 3 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Rp 10.000.000            |
| 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  | Rp 51.096.645            |
| 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan               | Rp 95.929.500            |
| 6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  | Rp 337.116.000           |
| 7 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan                        | Rp 1.109.644.000         |
| 8 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)                                | Rp 51.208.000            |
| 9 Program Peningkatan Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya dan Agama                             | Rp 253.698.000           |
| 10 Program Pendidikan Politik Masyarakat   | Rp 277.435.500           |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 3.098.000.000</b> |

Luwuk, 1 Oktober 2019

BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BANGGAI

 Drs. IRPAN POMA, ME  
 NIP. 19670615 198811 1 002

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                             |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI |  |   |  |   |
| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                         | Formula  | Sumber Data   |
| 1   | Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya | Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM          | Jumlah Angka Kejadian Konflik IPLESOSBUDHANKAM   | Laporan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)                            |
|   |  | Angka konflik SARA di masyarakat          | Jumlah Angka Kejadian Konflik SARA   | Laporan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), Forum Pembauran Kehansaan (FPK) |
| 2   | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya                     | persentase DPT yang menggunakan hak pilih | $\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap (DPT)}} \times 100 \%$ | Data Pilkada, Pileg, dan Pilpres Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai   |